

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa wisata telah menjadi tren pengembangan alternatif di pedesaan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh desa wisata yang tidak hanya menonjolkan keindahan alamnya, tetapi juga menawarkan suasana khas pedesaan. Desa wisata mencerminkan berbagai aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi, tradisi, dan adat istiadat, sekaligus menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selain itu, desa wisata juga menampilkan arsitektur bangunan dan tata ruang desa yang memiliki karakteristik unik.

Pengembangan desa wisata kini menjadi fokus utama dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal. Desa wisata merupakan area yang memiliki keunikan dan potensi daya tarik wisata khas, di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung kehidupan, tradisi, serta berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.

Pengembangan desa wisata didasarkan pada prinsip-prinsip utama untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat. Pertama, prinsip keaslian, yaitu atraksi wisata berasal dari aktivitas autentik masyarakat desa. Kedua, keterkaitan dengan tradisi dan kebiasaan lokal yang menjadi daya tarik utama. Ketiga, keterlibatan masyarakat, yang memastikan partisipasi aktif dalam kegiatan desa wisata. Keempat, sikap dan nilai, menjaga agar aktivitas wisata tetap sejalan dengan norma setempat. Terakhir, prinsip konservasi dan daya dukung, memastikan pengembangan desa wisata tidak merusak lingkungan fisik maupun sosial serta sesuai kapasitas desa menerima wisatawan. Semua prinsip ini bertujuan menciptakan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dan. (Wirdayanti et al., 2021).

Regulasi yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata mengatur pengelolaan desa wisata di tingkat provinsi, termasuk penguatan pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, Peraturan Bupati Kuningan No. 90 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2020-2028 menjadi panduan khusus untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan, termasuk strategi dan perencanaan desa wisata. Keseluruhan regulasi ini menjadi kerangka acuan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi utama dalam memanfaatkan potensi pariwisata lokal. Desa wisata adalah entitas yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya lokal. Pengembangan ini tidak hanya menciptakan pengalaman unik bagi wisatawan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola potensi desanya.

Dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten serta Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menganjurkan Pemerintah Kota/kabupaten dan Pemerintah Desa untuk berperan aktif dalam membina dan mengembangkan Desa Wisata di wilayah masing-masing, termasuk melalui upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi Desa Wisata, sehingga terwujud sinergi peran antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pembangunan Desa Wisata.

Tabel 1.1 Jumlah Desa Wisata di Jawa Barat

No	Kategori	Jumlah Desa Wisata
1	Rintisan	383
2	Berkembang	68
3	Maju	18
4	Mandiri	1
TOTAL		470

Sumber : (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024)

Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang tinggi, memiliki 470 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan budaya lokal. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi tinggi adalah Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan memiliki berbagai potensi wisata yang unik, seperti objek wisata budaya, alam, dan kuliner, yang menarik minat para wisatawan.

Kabupaten Kuningan adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi besar dan menjanjikan dalam pengembangan desa wisata. Dengan berbagai atraksi wisata alam, budaya, dan kuliner yang beragam, desa wisata di Kabupaten Kuningan mampu menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

Berdasarkan PERBUP Kuningan No 90 Tahun 2020 tentang “Rencana Induk Pembangun Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2020-2028” tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan adalah menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan kabupaten serta indikasi program pembangunan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan di kabupaten. Strategi pengembangan kepariwisataan di kabupaten kuningan diarahkan menjadi 4 jenis, yaitu : Pariwisata alam, pariwisata buatan, desa wisata dan pariwisata sejarah.

Berdasarkan RPJMD kabupaten kuningan tahun 2018-2023 Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. Berbasis Desa yang dimaksud adalah Kuningan sebagai Kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata,

sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Dengan misi utamanya yaitu mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut pemerintah kabupaten kuningan telah merancang berbagai strategi pengembangan pariwisata salah satunya yaitu pengembangan desa wisata.

Pemerintah Kabupaten Kuningan telah merumuskan berbagai strategi dalam pengembangan desa wisata yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2020-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023. Berikut penulis sajikan tabel perbandingan strategi dari berbagai dokumen yang telah di sebutkan.

Tabel 2.1 Strategi-strategi dari berbagai Dokumen Perencanaan

No	RPJPD	RIPPARKAB	RPJMD	RENSTRA
1	mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam dan keunikan serta keindahan bentang alam.	Membangun daya tarik wisata (DTW) dengan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing	mengembangkan wisata berbasis potensi lokal (desa),	Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara
2	mengembangkan penyediaan jasa lingkungan (environmental service) khususnya pariwisata alam dan pengembangan agribisnis.	Membangun Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing	mengembangkan kurikulum pariwisata pada pendidikan formal dan informal	Mengembangkan aksesibilitas, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata.
3	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat yang diakibatkan	Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan,	mengembangkan desa wisata dan wisata desa	Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitaspromosi

	perkembangan pariwisata daerah (Desa)	memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat		yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua produk wisata yang ada
4	pengelolaan pariwisata alam daerah yang handal dan modern dengan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang efisien dan pelaksana yang profesional.	Pengembangan investasi di bidang pariwisata dengan penyederhanaan prosedur pelayanan pemberian izin penanaman modal bidang pariwisata	mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dan meningkatkan kualitas SDM sektor pariwisata.	Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha pariwisata dan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
5	Mendayagunakan seluruh komponen pendukung pariwisata daerah yang unggul dengan pengelolaan yang efisien dan profesional	Mengembangkan kelembagaan pengelola pariwisata di kabupaten		Meningkatkan "sadar wisata" dan sapa pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Sumber : RJPD, RIPPARKAB, RPJMD, RENSTRA Kab Kuningan, diolah oleh peneliti, (2024)

Pemerintah kabupaten Kuningan telah menerapkan berbagai strategi, arah kebijakan dan program-program dalam pengembangan desa wisata, dengan adanya strategi, kebijakan, dan program yang terarah, pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berikut penulis sajikan tabel strategi, arah kebijakan dan program pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan.

Tabel 3.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pengembangan desa wisata

Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Meningkatkan daya dukung SDM dan Ekonomi Kreatif Kepariwisata	1. Peningkatan kapasitas pelaku, pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Peningkatan lapangan pekerjaan	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (desa wisata)

	sektor pariwisata dalam desa wisata	2. Program Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata (desa wisata)
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur kepariwisataan desa	1. Optimalisasi penataan destinasi desa wisata 2. Peningkatan penyediaan fasilitas di desa wisata	3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (desa wisata)
3. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata, penyelenggaraan event dan produk desa wisata	1. Peningkatan media promosi dan pemasaran pariwisata, penyelenggaraan event dan produk desa wisata 2. Berkembangnya pemasaran ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan 3. Peningkatan jejaring kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Program Pengembangan SDA dan SDM Pariwisata dan Ekonomi 5. Program Pembentukan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) 6. Program Pembentukan Forum Aksi Peduli Desa Wisata
4. Optimalisasi Potensi Sumber daya alam berbasis kawasan	1. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal desa dan kerakyatan 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan	
5. Meningkatkan Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan	1. Pembentukan kelembagaan pengelola kepariwisataan	

Sumber : Dokumen Perencanaan Kab.Kuningan, Diolah oleh peneliti (2024)

Kabupaten Kuningan memiliki 39 desa wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, pengembangan desa wisata ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang belum memadai, serta minimnya promosi dan pemasaran yang efektif.

Tabel 4.1 Jumlah Desa Wisata di Kab. Kuningan

No	Nama Desa Wisata	Desa	Kecamatan
1	Desa wisata Cibuntu	Cibuntu	Pasawahan
2	Desa Wisata Kampung Tumaritis	Sakerta Timur	Darma
3	Desa Wisata Cisantana	Cisantana	Cigugur
4	Desa Wisata Maniskidul	Maniskidul	Jalaksana
5	Desa Wisata Pakembangan	Pakembangan	Mandirancan
6	Desa Wisata Linggamekar	Linggamekar	Cilimus
7	Desa Wisata Padabeunghar	Padabeunghar	Pasawahan
8	Desa Wisata Setianegara	Setianegara	Cilimus
9	Desa Wisata Cigugur	Cigugur	Cigugur
10	Desa Wisata Panawuan	Panawuan	Cigandamekar
11	Desa Wisata Sangkanurip	Sangkanurip	Cigandamekar
12	Desa Wisata Cipasung	Cipasung	Darma
13	Desa Wisata Kaduela	Kaduela	Pasawahan
14	Desa Wisata Paniis	Paniis	Pasawahan
15	Desa Wisata Singkup	Singkup	Pasawahan
16	Desa Wisata Kertayuga	Kertayuga	Nusaherang
17	Desa Wisata Citundun	Citundun	Ciwaru
18	Desa Wisata Trijaya	Trijaya	Mandirancan
19	Desa Wisata Randobawagirang	Randobawagirang	Mandirancan
20	Desa Wisata Seda	Seda	Mandirancan
21	Desa Wisata Pakembangan Garawangi	Pakembangan	Garawangi
22	Desa Wisata Cibeureum	Cibeureum	Cibeureum
23	Desa Wisata Pajambon	Pajambon	Kramatmulya
24	Desa Wisata Cikaso	Cikaso	Kramatmulya
25	Desa Wisata Sadamantra	Sadamantra	Jalaksana
26	Desa Wisata Karangsari	Karangsari	Darma
27	Desa Wisata Cageur	Cageur	Darma
28	Desa Wisata Sukarapih	Sukarapih	Cibeureum
29	Desa Wisata Randobawailir	Randobawailir	Mandirancan
30	Desa Wisata Cileuya	Cileuya	Cimahi
31	Desa Wisata Margacina	Margacina	Karangkencana
32	Desa Wisata Jatimulya	Jatimulya	Cidahu
33	Desa Wisata Cibulan	Cibulan	Cidahu
34	Desa Wisata Bantar Panjang	Bantar Panjang	Cibingbin
35	Desa Wisata Citenjo	Citenjo	Cibingbin
36	Desa Wisata Dukuh Badag	Dukuh Badag	Cibingbin
37	Desa Wisata Sukadana	Sukadana	Ciawigebang
38	Desa Wisata Cimara	Cimara	Cibeureum
39	Desa Wisata Citangtu	Citangtu	Kuningan

Sumber : RIPPARKAB Kuningan, Diolah Peneliti, (2025)

Pengembangan desa wisata ini berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian budaya lokal. Namun, beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan perlu mendapatkan perhatian serius. (Masruroh & Nurhayati, 2016).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada khalayak masyarakat. Disamping itu, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai keadilan dan pemerataan, dibutuhkan kewenangan yang luas, jelas, dan akuntabel. (Ridwan & Sudrajat, 2014).

Setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola sektor pariwisatanya sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Kuningan untuk merumuskan strategi pengembangan yang mampu mengatasi berbagai kendala tersebut dan mengoptimalkan potensi desa wisata yang dimilikinya. Namun data menunjukkan dari 39 Desa wisata yang terdapat di Kabupaten Kuningan hanya terdapat beberapa saja yang terverifikasi dan terealisasi yang mana hal ini menunjukkan masih belum optimalnya strategi pengembangan desa wisata yang sudah dijalankan oleh Pemerintah kabupaten Kuningan.

Tabel 5.1 Desa Wisata yang Telah Terverifikasi

No	Desa Wisata	Status	Klasifikasi
1	Desa Wisata Cibuntu	Terverifikasi	Mandiri
2	Desa Wisata Cibuntu, Kampung Adat Bojong Honje	Belum Terverifikasi	Rintisan
3	Desa Wisata Cikaso	Terverifikasi	Berkembang
4	Desa Wisata Cisantana	Terverifikasi	Rintisan
5	Desa Wisata Kaduella	Terverifikasi	Rintisan
6	Desa Wisata Maniskidul	Terverifikasi	Rintisan
7	Desa Wisata Paniis	Terverifikasi	Rintisan
8	Desa Wisata Puncak	Belum Terverifikasi	Rintisan

Sumber : Website Resmi Jadesta.co.id, diolah oleh peneliti, (2024)

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan belum berjalan secara optimal. Hal ini diduga karena belum terpenuhinya dimensi-dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama pengembangan kepariwisataan. Berdasarkan dimensi pengembangan

kepariwisataan oleh Suansri, peneliti menduga dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi politik belum maksimal dilihat dari masih mengalami keterbatasan dalam hal sarana promosi dan pemasaran digital untuk mengembangkan usaha, aksesibilitas yang kurang memadai dan belum memadainya pengetahuan dan keterampilan penggerak wisata dalam mengelola dan mengembangkan wisatanya sehingga menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan belum optimal dilihat dari 39 desa wisata yang terdapat di kabupaten kuningan dengan target 25 desa wisata yang terealisasi, akan tetapi sampai saat ini hanya ada 8 desa wisata yang telah terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan belum dapat memanfaatkan potensi desa wisata ini dengan optimal, hanya 8 dari 39 desa wisata yang terealisasi dan terverifikasi, Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pengembangan desa wisata, sehingga banyak potensi yang belum tergali secara maksimal dan mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan, pengelolaan dan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia sebagai penggerak pariwisata serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Melihat banyaknya potensi desa wisata di Kabupaten Kuningan sangat berprospek tinggi dan memberikan kebermanfaatn serta desa wisata yang dikelola dengan baik mampu membawa manfaat positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial, bagi komunitas lokal. Dilihat dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat topik tersebut dengan judul penelitian **“Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Kuningan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan sarana promosi dan pemasaran digital

2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan penggerak pariwisata
3. Keterbatasan aksesibilitas menuju wisata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana dimensi ekonomi dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan?
2. Bagaimana dimensi social dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan?
3. Bagaimana dimensi budaya dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan?
4. Bagaimana dimensi lingkungan dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan?
5. Bagaimana dimensi politik dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan?

Permasalahan yang dirumuskan tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam meningkatkan potensi desa wisata, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dimensi ekonomi dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan.

2. Untuk mengetahui dimensi social dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan.
3. Untuk mengetahui dimensi budaya dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan.
4. Untuk mengetahui dimensi lingkungan dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan.
5. Untuk mengetahui dimensi politik dalam strategi pengembangan desa wisata di kabupaten kuningan.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis dan praktis yang signifikan. Dari segi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan pariwisata serta pengelolaan sumber daya lokal.

Sementara itu, dari segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan desa wisata. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, masyarakat dan pengelola desa wisata dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola potensi pariwisata lokal, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

F. Kerangka Berpikir

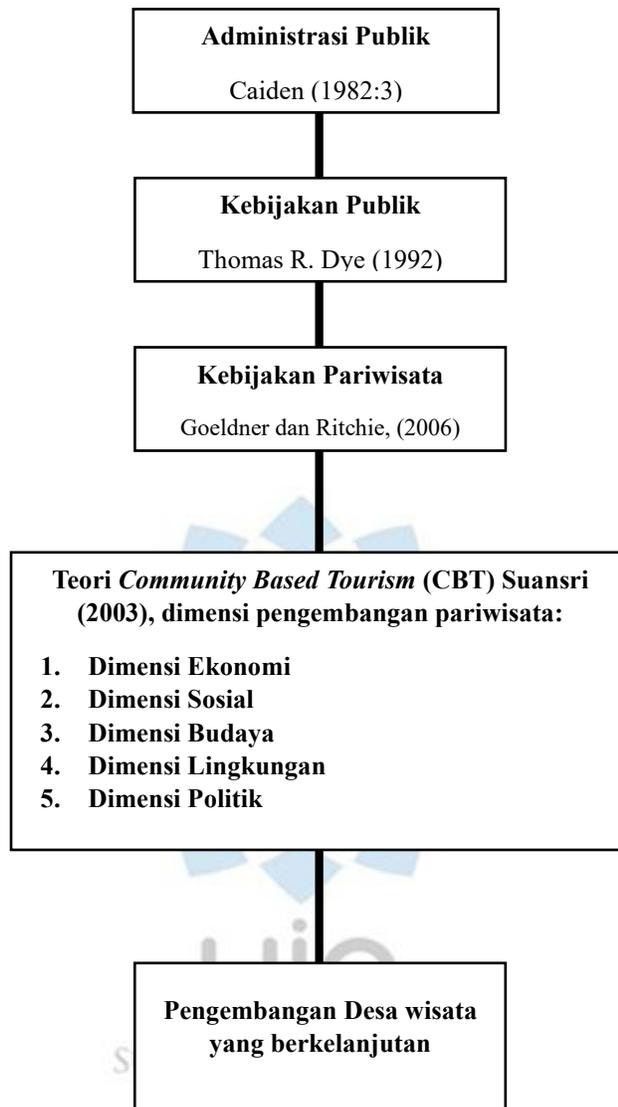
Konsep Administrasi Publik mencakup teori kebijakan publik. Menurut Keban, istilah Administrasi Publik menggambarkan peran pemerintah sebagai agen utama dengan kewenangan sebagai regulator yang secara aktif mengatur, mengambil tindakan, dan inisiatif yang dianggap penting atau bermanfaat bagi

masyarakat. Hal ini didasari asumsi bahwa masyarakat cenderung pasif, kurang berdaya, dan harus menerima setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Keban, 2008:4).

Menurut murphy (1988), *Community Based Tourism* merupakan strategi pengembangan kepariwisataan yang menitikberatkan pada peran masyarakat sebagai tuan rumah (host) berfokus pada keinginan dan kemampuan mereka untuk meraih manfaat dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat perlu didorong untuk mengenali tujuan mereka sendiri dan mengarahkan pengembangan pariwisata agar dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal secara optimal.

Suansri (2003), *community based tourism* merupakan sebuah konsep yang mengedepankan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Tujuan utama konsep ini adalah meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam mengelola sumber daya pariwisata yang tersedia. Konsep Community-Based Tourism (CBT) ini juga menaruh perhatian besar pada aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam proses pengembangannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Community Based Tourism* (CBT) Suansri (2003), yang merupakan salah satu strategi pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan Masyarakat. Penulis membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan teori yang digunakan yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2024)